



1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LAM RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

SKRIPSI



Oleh

NURUL FADILAH
NIM 11775201387

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LAM RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh

NURUL FADILAH
NIM 11775201387

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURUL FADILAH
NIM : 11775201387
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI LAM RIAU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU
RIAU

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing



Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si
NIK 130 717 057

MENGETAHUI

Dekan


Ketua Jurusan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Dr. Drs. H. M. Said HM, M. Ag. MM
NIP. 19620512-198903 1 003



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

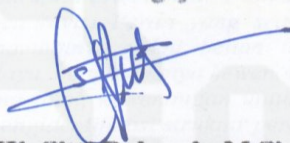
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURUL FADILAH
NIM : 11775201387
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LAM RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
TANGGAL UJIAN : 20 APRIL 2021

DISETUJUI OLEH

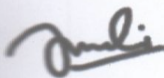
Ketua Penguji



Dr. Hi. Siti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002

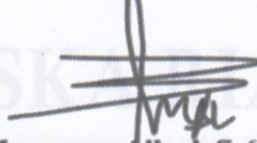
MENGETAHUI:

PENGUJI I



M. Alim Rustam, S.IP, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001

PENGUJI II



Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130712075



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LAM RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

OLEH :

NURUL FADILAH
NIM 11775201387

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan-persoalan pada tugas pokok dan fungsi LAMR yang berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau yang sudah berlangsung 8 tahun terakhir. Persoalan ini berupa konflik LAMR mandau dengan sebuah Yayasan Adat Batak di kota Duri, beralih fungsinya LAM Riau menjadi mitra bisnis blok rokan, menjadi panutan LAM Kepri Tanjungpinang dalam penyusunan Perda dan berakhir pada revisi Perda yang sedang dilakukan LAM Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau dan faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan fungsi LAM Riau yang terdapat di dalam Peraturan Daerah. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LAM Riau belum maksimal dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau hal ini dibuktikan dengan adanya revisi Perda yang sedang dilakukan oleh LAM Riau, sedangkan faktor penghambatnya yakni belum termuatnya struktur dan bagan masyarakat suku asli Melayu, belum adanya kewenangan seperti menjadi mediator perdamaian masalah yang final, kewenangan untuk menginventarisasi tanah ulayat dan kewenangan untuk mengidentifikasi struktur perbatinan negeri.

Kata Kunci : Penerapan, Peraturan Daerah, LAM Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya (*Shallallâhu alaihi wa âlihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu penulis mohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Antoni dan Ibunda Jumiati, orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
2. Terimakasih buat Kakak ku Ani Sri Juita dan Adik-Adik ku Dea Maharani, Haikal Putra, Adnan Driga dan Diva Hanifah, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan Skripsi ini dapat berjalan lancar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr.Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
4. Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. tempat di mana penulis menimba banyak ilmu di sana.
5. Bapak Dr. Kamaruddin. S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis menimba banyak ilmu di sana.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis masih menimba banyak ilmu disana.
7. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si. selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
8. IbundaFitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Siselaku Pembimbing skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan Skripsi ini.
9. Terimakasih untuk pihak Lembaga Adat Melayu Riau yang telah memberikan izin dan bantuan kepada Penulis dalam melakukan penelitian.
10. Rekan-rekan seperjuangan penulis dan sahabat bertukar pikiran, Rindu Annisa, M. Taufik, Randa Syaputra, Muhammad Jefri dan Iryanda Aditama selama penulisan Skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Untuk teman-teman Singelillah Misrianti, Intan Permata Sari, Reikha Muthia Dewi, Nabila Salsabila, Putri Aprilita Tumanggor, Jaz Marita, Siti Annisa, Nur Hafizah Afni dan Siti Nur Jannah.

12. Seluruh teman Administasi Negara 2017 Lokal D yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip, salin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Manfaat Penulisan	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Organisasi Publik	14
2.2 Kebijakan Publik	16
2.3 Implementasi Kebijakan	18
2.4 Peraturan Daerah	19
2.5 Pandangan Islam	21
2.6 Penelitian Terdahulu	23
2.7 Definisi Konsep	25
2.8 Konsep Operasional	27
2.9 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian	29
3.3 Jenis Dan Sumber Data	30
3.4 Informan Penelitian	31

3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Kota Pekanbaru	34
4.1.1 Geografis	35
4.1.2 Demografis	35
4.2 Lembaga Adat Melayu Riau	37
4.2.1 Sejarah lahirnya Lembaga Adat Melayu Riau	37
4.2.2 Lokasi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau	38
4.2.3 Visi Misi, Fungsi, Tujuan dan Tugas Lembaga Adat Melayu Riau	38
4.2.4 Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau	44
5.2 Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau	55
5.2.1 Belum termuatnya struktur dan bagan Masyarakat Suku Asli, Sultan dan Raja Melayu.	55
5.2.2 Belum adanya kewenangan menjadi mediator penyelesaian masalah perdamaian yang final	56
5.2.3 Belum adanya kewenangan untuk menginventarisasi tanah ulayat	57
5.2.4 Belum adanya kewenangan LAM Riau untuk mengidentifikasi dan menetapkan struktur	

- Hak Cipta Didukungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbatinan negeri serta melegalkan kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan adat melayu.	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur kepengurusan LAM Riau tahun 2017-2022.....	3
Tabel 4.1 Komposisi Agama Di Kota Pekanbaru Tahun 2018	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru	36



Hak Cipta Dukung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kota Pekanbaru	34
Gambar 4.2 Lembaga Adat Melayu Riau	37



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi publik merupakan sesuatu yang abstrak dalam kehidupan saat ini, sulit dilihat namun dapat dirasakan eksistensinya di masyarakat. Hampir dalam semua aspek kehidupan, organisasi tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dinamakan organisasi kemasyarakatan atau dengan kata lain Ormas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan organisasi kemasyarakatan tentunya mengalami perubahan sesuai dengan arah kebutuhan yang ada di masyarakat. Salah satunya organisasi kemasyarakatan LAM Riau, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (4), berbunyi bahwa Lembaga Adat Melayu Riau atau yang disingkat LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat

budaya di Riau. Kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan adat istiadat khususnya adat melayu sangat dominan hingga saat ini terkhususnya masyarakat Provinsi Riau yang kental akan budaya melayu, Sehingga diperlukannya sebuah organisasi yang dapat mengendalikan perilaku masyarakat melayu terhadap konflik adat di kehidupan sehari-hari.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama Lembaga Adat Melayu Riau. Pendirinya berasal dari tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi yaitu Pejabat Pemerintahan, Ulama, Ilmuwan/Cendekiawan dari Perguruan Tinggi di Riau, Budayawan, Seniman, Sastrawan dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Dari kalangan pemerintahan, tokoh utama pembentuk lembaga ini adalah Gubernur Riau waktu itu yakni Arifin Achmad, ia mengatakan bahwa “perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah lembaga adat yang menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau.” Batang terendam ialah jatidiri atau identitas budaya di dalam dinamika ke-Indonesia-an. Tujuan didirikannya Lembaga Adat Melayu Riau berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Bab V Pasal 6 yang berbunyi bahwa:

LAM Riau bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budayasebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat melayu.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.
3. LAM Riau bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

Tabel 1.1
Struktur kepengurusan LAM Riau tahun 2017-2022

No	SUSUNAN KEPENGURUSAN	JUMLAH (Orang)
1.	Dewan kehormatan adat (DKA)	30
2.	Kumpulan Sri Mahkota Diraja Negeri Melayu Riau	4
3.	Majelis Kerapatan Adat (MKA)	49
4.	Dewan Pimpinan Harian (DPH)	57
5.	Bidang Organisas, Kaderisasi Dan Tata Laksana	10
6.	Bidang Kerjasama Antar Lembaga Dalam Dan Luar Negeri	8
7.	Bidang Ormas Dan Pengembangan Komunitas Adat	9
8.	Bidang Pentakbiran Dan Siasah	9
9.	Bidang Kesejahteraan Dan Kebajikan Sosial	8
10.	Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Kerja Tempatan	10
11.	Bidang Advokasi Hak-Hak Masyarakat Adat	8
12.	Bidang Perdagangan, Koperasi Dan Pengembangan Usaha	10
13.	Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	8
14.	Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kesenian Melayu	10
15.	Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kuliner Melayu	12
16.	Bidang Pengembangan Industri Dan Kewirausahaan	9
17.	Bidang Pengembangan Kajian Islam	8
18.	Bidang Pendataan Komunitas Dan Khasanah Adat Melayu	11
19.	Bidang Pelestarian Adat Melayu	8
20.	Bidang Pembinaan Pengembangan Sastra Dan Seni Melayu	10
21.	Bidang Penegakan Hukum Dan Perlindungan Masyarakat Adat	8
22.	Bidang Polisi Adat	9
23.	Bidang Dakwah Dan Keagamaan	12

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	SUSUNAN KEPENGURUSAN	JUMLAH (Orang)
24.	Bidang Humas, Publikasi Dan Dokumentasi	12
25.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	11
26.	Bidang Pengembangan Masyarakat Dalam Lingkungan Perusahaan	9
27.	Bidang Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam	10
28.	Bidang Pemetaan Hutan Tanah Masyarakat Adat	10
29.	Bidang Lingkungan Hidup, Amdal Dan Pembangunan Berkelanjutan	10
30.	Bidang Pengembangan Pertanian, Agri Bisnis Dan Perkebunan	8
31.	Bidang Pengkajian, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Melayu	10
32.	Bidang Perpustakaan Dan Manuskrip Melayu	9
33.	Bidang Pelatihan Upacara Adat	11
34.	Bidang Pendidikan, Litbang, Riset Dan Teknologi	9
35.	Bidang Pemberdayaan Potensi Pertambangan Dan Migas	7
36.	Bidang Legislasi	7
Jumlah		440

Sumber : Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Riau Nomor : SK-35/LAMR/XII/2018

Berdirinya LAM Riau sebagai organisasi kemasyarakatan adat melayu tentunya memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat melayu di Indonesia khususnya Provinsi Riau. Dengan adanya penegakan nilai-nilai luhur adat Melayu Riau memberikan perlindungan kepada masyarakat melayu terhadap penindasan budaya yang dilakukan oleh pihak lain. LAM Riau termasuk salah satu organisasi kemasyarakatan yang legal dan diakui oleh pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan di keluarkannya Peraturan Daerah

No 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, yang secara khusus membahas segala ketentuan umum LAM Riau.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Adat Melayu di Provinsi Riau, LAM Riau menjadikan Peraturan Daerah sebagai landasan dalam melakukan kegiatan. LAM Riau bukan hanya sekedar memperjuangkan budaya melayu namun juga dapat menyelesaikan konflik yang disampaikan kepada pihak LAM Riau. Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, diantaranya:

Pertama, persoalan terjadi di salah satu Lembaga Adat Melayu Riau yakni LAMR Mandau tepatnya yang berada di Kota Duri, terjadi konflik antara salah satu warga beretnik Batak yang memiliki sebuah Yayasan Raja Mula Tawar Jadi, yang bergerak dibidang sosial dan kebudayaan Batak dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Kecamatan Mandau. Konflik ini terjadi karena LAMR Mandau menolak acara peresmian balai adat Batak yang akan diresmikan oleh pihak yayasan, dimana penolakan ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya : a. Pendirian balai adat Batak ini tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) serta saat peresmian, rumah adat ini akan diresmikan dan dialih fungsikan sebagai balai adat yang mana bagi pihak LAMR Mandau dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 mengatakan bahwa balai adat tertinggi di Provinsi Riau ini adalah Lembaga Adat Melayu Riau dan disetiap daerah dari tingkat kota hingga kecamatan terdiri dari 1 balai adat daerah masing-masing,

b. peresmian balai adat Batak ini tidak sesuai dengan visi misi Riau 2020 yang berbunyi Riau sebagai pusat Kebudayaan Melayu Se-Asia Tenggara, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau (AD-ADRT) bahwa setiap pembangunan di Provinsi Riau baik secara fisik maupun non-fisik untuk menunjang terwujudnya visi misi Riau 2020 tersebut maka harus ada unsur-unsur pembangunan bernuansa Melayu. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan peresmian balai adat Batak di Kecamatan Mandau. Persoalan ini diselesaikan dengan cara negosiasi antara LAMR Mandau dengan pihak Yayasan Balai Adat Batak. (Isradana, 2019)

Kedua, Seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin modern dan luasnya pemikiran masyarakat saat ini, LAM Riau mendapatkan tantangan dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Adat Melayu di Provinsi Riau, sehingga LAM Riau melakukan pengajuan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau ke DPRD Riau. Pada tanggal (06/01/2021) hari Rabu sore pimpinan DPRD Riau yang terdiri dari ketua DPRD dan wakilnya menerima kunjungan resmi sejumlah pengurus Lembaga Adat Melayu Riau yang dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian yakni Datuk Seri Syahril Abubakar di ruangan pimpinan DPRD Riau. Kunjungan resmi ini membahas beberapa permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau khususnya permasalahan yang menyangkut dengan adat Melayu. Mulai dari pengawalan Blok Rokan yang akan *hand over* dari Chevron ke

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertamina, sehingga LAM Riau terus berusaha agar 39% saham Blok Rokan ini dapat di pegang oleh LAM Riau selaku lembaga adat tertinggi di Provinsi Riau yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Melayu, konflik tanah ulayat yang sering terjadi dengan perusahaan seperti kasus Bongku dan Sinamanenek hingga munculnya perbatinan-perbatinan di beberapa daerah di Riau yang menimbulkan konflik baru antara lembaga adat dengan masyarakat daerah. (dikutip dalam bermadah.co.id, (16/02/21)

Datuk seri syahril abubakar menyampaikan mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau yang sudah berjalan delapan tahun artinya sudah banyak hal yang menguntungkan terhadap keberadaan LAM Riau ini. Namun, dengan perkembangan zaman tentunya payung hukum ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat melihat dengan banyaknya persoalan-persoalan yang harus di selesaikan Lembaga Adat Melayu Riau. Terkait revisi peraturan daerah ini LAM Riau akan menyiapkan panitia khusus (Pansus) untuk membahas revisi Perda Nomor 1 Tahun 2012 ini. Ia juga menyampaikan bahwa pihak LAM Riau sudah menyurati pihak DPRD Riau untuk melakukan revisi terhadap Perda ini dengan memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat adat terutama kepada LAM Riau sebagai payung bagi keseluruhan masyarakat yang ada di Provinsi Riau untuk mengantisipasi ke depan khususnya terhadap tanah ulayat yang semakin di akui keberadaannya. (dikutip dalam bermadah.co.id, (16/02/21)

Selain itu Datuk Seri Syahril Abubakar juga menyampaikan bahwa LAM Riau juga sudah menghadapi beberapa masyarakat hukum adat yang seperti partai politik, sehingga ada semacam mosi tidak percaya kepada batin-batin atau adanya batin ganda karena sudah ada nilai ekonomis terhadap tanah adat atau ulayat seiring dengan kebijakan pemerintah hari ini. Untuk itu perlu adanya suatu lembaga yang mengatur hal ini mulai dari fungsi hingga tupoksinya, sehingga LAM Riau bisa melegalkan masyarakat hukum adat ini baik dari susunan masyarakatnya, perangkatnya dan sebagainya. Hal inilah yang perlu dimasukkan dalam revisi peraturan daerah tersebut. (dikutip dalam bermadah.co.id, (16/02/21)

Ketiga, Selain itu persoalan LAM Riau yang berkeinginan untuk menjadi pemegang saham Blok Rokan sebanyak 39% dinilai kurang tepat menurut beberapa petinggi negara. Seperti Eks Mendagri Era Presiden BJ Habibie Syarwan Hamid, ia mengungkapkan bahwa yang cocok menjadi pengelola ladang minyak bumi Blok Rokan adalah pihak yang benar-benar piawai untuk mengelola minyak bumi dan dia juga menilai LAM Riau dibentuk untuk mengurus adat bukan berbisnis. Serta Datuk Panglima Harian LMB Ismail Amir juga mengatakan bahwa LAM sudah salah kaprah dan kembalilah ke fungsinya sebagai lembaga adat. Ia juga menyinggung tentang marwah LAM Riau setelah peninggalan Datuk Tenas Efendy, ia mengungkapkan LAM Riau kehilangan ruhnyanya sejak peninggalan Datuk Tenas, dulu LAM disegani dan sangat dihormati pada zaman datuk. (dikutip dalam sindonews.com, 28/2/21)

Keempat, Dibalik persoalan yang ada, LAM Riau juga menjadi panutan bagi LAM Kepri Tanjungpinang untuk meminta masukan mengenai organisasi LAMR dan penyusunan perda lembaga adat, dikarenakan LAM Kepri Kota Tanjungpinang sedang memperjuangkan adanya Peraturan Daerah atau Perda sehingga marwah melayu di Kota Tanjungpinang benar-benar bisa ditegakkan. Datuk Wirah Ahmad Yani juga mengungkapkan akan mengadopsi masukan-masukan dari LAM Riau jika sesuai dengan kondisi di Kota Tanjungpinang.(dikutip dalam rri.co.id,28/2/21). Menjadi panutan dalam menyusun perda menjadi bukti bahwa LAM Riau dinilai mampu menjadi panutan bagi LAM wilayah lain untuk tetap tegak di wilayahnya dengan peraturan yang jelas dan legal.

Banyaknya persoalan adat yang terjadi hingga berakhir pada revisi peraturan daerah tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau yang sudah berjalan delapan tahun terakhir dan melihat tantangannya sehingga perlu adanya revisi yang dilakukan LAM Riau ini. Sehingga peneliti menarik judul penelitian tentang **“Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah peneliti uraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau ?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau serta syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1).
- b. Bagi lokasi penelitian, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Lembaga Adat Melayu Riau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.
- c. Bagi Universitas, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, serta dapat dijadikan bahan acuan pada penelitian selanjutnya

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, Sistematika disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi sehingga dijadikan sebagai bahan penelitian, kemudian ada Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari berbagai pendapat teori-teori yang erat kaitannya dengan Organisasi Publik, Kebijakan, Implementasi Kebijakan serta Peraturan Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum penelitian mulai dari Kota Pekanbaru sebagai tempat keberadaan Lembaga Adat Melayu Riau, baik dari letak geografisnya hingga masyarakatnya, serta memaparkan tentang Lembaga Adat Melayu Riau, baik dari Sejarahnya, Visi dan Misi, Tujuan, Tugas dan Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, mulai dari pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat Melayu Riau berdasarkan Peraturan Daerah hingga faktor yang menjadi penghambat Lembaga Adat Melayu Riau dalam menerapkan peraturan tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan serta saran penulis untuk Lembaga Adat Melayu Riau agar dapat melaksanakan Peraturan Daerah lebih optimal kedepannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Organisasi Publik

Menurut (Nugroho, 2017) Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan teratur secara sistematis memiliki peran, fungsi dan tugas masing-masing. Organisasi publik merupakan organisasi non-profit yang memiliki tujuan utama untuk kepentingan umum tanpa perhitungan rugi dan laba. Wujud dari organisasi publik dapat berupa pemerintah pusat (kementerian dan lembaga setingkat), pemerintah daerah, yayasan atau organisasi masyarakat (Ormas).

Organisasi publik Menurut Robbins (1990) dalam (Mohamad Thahir Haning, 2021) adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif secara terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Batasan yang dapat diidentifikasi dapat berupa wilayah kuasa organisasi yang dapat diatur dan dibentuk sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Organisasi sektor publik Menurut Ndraha dalam (Patarai, 2020) memiliki ciri sebagai berikut: tidak mencari keuntungan finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik, kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham, dan keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan *consensus*.

Keberhasilan sebuah organisasi publik yang berupa kemasyarakatan diukur berdasarkan kesejahteraan masyarakat lingkungan yang ada di organisasi

masyarakat tersebut, namun Organisasi publik yang berupa kelembagaan dapat dikatakan berhasil Menurut (Asang, 2019) apabila lembaganya memiliki daftar inventarisasi terhadap aspek-aspek lingkungan yang memiliki hubungan yang kuat terhadapnya. Sedangkan Pemikiran dari sarjana Administrasi Publik yang berkebangsaan Amerika Serikat Osborne dan Gaebler yang memberikan pengaruh yang besar terhadap pergeseran peran organisasi publik. Menurut mereka, organisasi yang digerakkan oleh misi jauh lebih memperhatikan kepentingan publik dibandingkan organisasi yang digerakkan oleh peraturan yang kaku dan mengikat. Sehingga mereka menggambarkan keuntungan organisasi yang lebih mengedepankan misi dari pada peraturan, diantaranya :

1. Organisasi yang digerakkan oleh misi akan lebih efisien dari pada organisasi yang digerakkan oleh peraturan.
2. Organisasi akan lebih efektif digerakkan oleh misi daripada yang digerakkan oleh peraturan, dalam arti lebih dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.
3. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih inovatif dari pada yang digerakkan oleh peraturan.
4. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih luwes dari pada yang digerakkan oleh peraturan.
5. Organisasi yang digerakkan oleh misi lebih mempunyai semangat lebih tinggi daripada yang digerakkan oleh peraturan.

Dari pendapat ahli di atas terlihat bahwa misi dalam sebuah organisasi publik sangat mempengaruhi kualitas organisasi tersebut dari pada peraturan yang mengikat dan kaku. Sehingga dengan misi yang dimiliki, organisasi dapat lebih meningkatkan pelayanan dalam mengatur masyarakat sekaligus membangun kesejahteraan sosial.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan hasil dari rangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait dan mengikat, sehingga terbentuklah kebijakan. Definisi kebijakan Menurut James E. Anderson (1979) dalam (Moh. Yunus, 2021) mengungkapkan bahwa kebijakan sebagai perilaku (sikap) dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah), atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (politik). Artinya dilakukan oleh pihak yang berkuasa dan memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan kebijakan tertentu. Kebijakan pun dapat didefinisikan Menurut (Uddin B. Sore, 2017) dari teori-teori yang mengikutnya, diantaranya:

1. Teori Kelembagaan, memandang kebijakan sebagai aktifitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan publik.
2. Teori Kelompok, memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada saat tertentu.
3. Teori Elit memandang kebijakan pemerintah sebagai kelompok elit yang memerintah.

4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan tetap.
5. Teori Inkremental memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
7. Teori Kebijakan yang lain adalah Teori Campuran, yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Kebijakan Publik Menurut (Nugroho R. , 2021) adalah kebijakan yang terdiri dari empat jenis, yaitu kebijakan formal, kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama, pernyataan pejabat publik dalam forum publik dan perilaku pejabat publik. Jenis kebijakan ini akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya apabila bersatunya sistem kebijakan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Menurut Dye (1978:9) dalam (Widodo, 2021) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yakni kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Apabila salah satu dari elemen sistem kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik maka kebijakan publik tidak dapat berjalan dengan maksimal.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah dua kata yang berbeda namun saling mempengaruhi dan diakui eksistensinya. Implementasi berkaitan dengan pelaksanaan, sedangkan kebijakan berkaitan dengan peraturan yang bersifat memaksa untuk seluruh pelaksana kebijakan. Menurut Awang dalam (Hayat, 2018) mengemukakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Hal ini berarti tahap implementasi merupakan tahapan yang panjang sehingga proses yang diberikan adalah keluaran (*output*) maupun dampak (*outcome*). Teori *George C. Edward III* dalam (Angin, 2021) berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni:

1. Komunikasi, artinya keberhasilan implementor dalam mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang akan menjadi sasaran dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun apabila implementor kekurangan sumberdaya dalam pelaksanaannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki disposisi yang baik, maka impelmentor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik.

4. Struktur birokrasi, inilah yang bertugas mengimplementasikan kebijakan melalui pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah *standard operating prosedure* (SOP) dan fragmentasi.

2.4 Peraturan Daerah

Definisi peraturan daerah dalam wikipedia yakni Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota/Bupati) disadur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 2012. Peraturan daerah ini terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Salah satu bentuk Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Peraturan daerah ini menjelaskan ketentuan umum dari LAM Riau, seperti Susunan Organisasi, Falsafah Dan Asas, Tujuan, Bentuk Dan Fungsi, Tugas Pokok, Peran LAM Riau Dalam Pelestarian Budaya, Hubungan Kerjasama, Setia Amanah Adat, Kekuasaan dan Keanggotaan, Pendanaan, Serta Lambang, Tanda Kebesaran, Gelar Kehormatan dan Hari Besar Adat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi LAM Riau berdasarkan peraturan daerah ini yakni:

1. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu.
2. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau.
4. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama, dan
5. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi tersebut diperlukannya tugas pokok agar fungsi LAM Riau dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Tugas pokok LAM Riau diantaranya:

1. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
2. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi

penerus yang berjati diri ke Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.
4. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
5. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hal-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Pandangan Islam

Dalam islam kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, baik dari individu maupun kelompok. Tolong-menolong dalam kebaikan dapat dilakukan dengan membentuk organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat dapat bertingkah laku seperti apa yang dilakukan dan di sarankan organisasi tersebut. Salah satu organisasi publik yang dapat memberikan pengaruh yang besar dalam aspek budaya Melayu khususnya di Provinsi Riau adalah Lembaga Adat Melayu

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau (LAM Riau). LAM Riau adalah salah satu organisasi yang memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau. Alquran telah menjelaskan secara akurat bagaimana kita hidup di muka bumi, Seperti beberapa surat yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-imran: 104).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَنِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” QS. Al-Maidah ayat 2)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ أَمْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarung mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 71)

Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa kita sebagai umat islam dalam bermasyarakat sudah seharusnya saling tolong menolong dalam menyerukan kebajikan dan mencegah kemungkaran serta melaksanakan rukun islam dengan sebaik-baiknya, agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Melihat dari beberapa penelitian terdahulu, penulis mendapatkan beberapa penelitian dengan judul yang hampir sama, diantaranya:

- 6 Hasanah tahun 2019 dengan judul penelitian **Strategi Humas Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Mensosialisasikan Budaya Melayu di Provinsi Riau**. Masalah penelitian ini adalah banyaknya masyarakat khususnya masyarakat Riau yang khususnya ada diperkotaan kurang mengenal bahkan tidak mengetahui budaya melayu yang ada di Provinsi Riau, ini dikarenakan kurangnya pengenalan terhadap budaya Melayu. Maka disinilah perlunya peran seorang humas pada sebuah instansi khususnya di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Hasil dari penelitian ini adalah Humas Lembaga Adat Melayu Riau menggunakan strategi dengan memanfaatkan media, seperti media cetak, media elektronik dan media online dan juga melakukan pembinaan kepada tokoh-tokoh adat yang ada di masing-masing

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang ada di Provinsi Riau, strategi humas Lembaga Adat Melayu ini tentunya diharapkan dapat mensosialisasikan serta mempublikasikan segala bentuk kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau. Sedangkan penelitian ini cenderung mengulas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau khususnya dalam menjalankan fungsinya untuk mensosialisasikan budaya Melayu.

- 7 Dodi Iskandar tahun 2020 dengan judul Penelitian **Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam Pelestarian Budaya Bahasa Melayu di kota Pekanbaru**. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan perkembangan budaya Melayu saat ini yang masih belum terlihat dan cenderung semakin menghilang, salah satunya adalah penggunaan budaya bahasa Melayu. Hasil penelitian ini adalah bahwa Penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih belum terlihatnya tanda-tanda peningkatan dalam penggunaan bahasa Melayu. Terlebih lagi antusias masyarakat terhadap budaya bahasa Melayu semakin berkurang seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan penelitian ini cenderung mengulas tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhmad Museno tahun 2019 dengan judul penelitian **Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau**. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, serta faktor yang menghambat peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, belum berjalan secara optimal sesuai dengan harapan dan juga peraturan yang mengatur, adapun faktor yang menjadi penghambatnya adalah kurang optimalnya sumber finansial, tenaga, sumber daya manusia, kualitas kerja dan kerjasama dalam menjalankan tuangnya. Sedangkan penelitian ini cenderung mengulas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau oleh LAM Riau.

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok individu yang menjadi pusat perhatian

dalam ilmu sosial. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan batasan pada bagian selanjutnya, hal ini agar memberikan arah dan penulisan berikutnya yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok merupakan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tertentu.
2. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional
3. TUPOKSI adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau
5. Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan dalam bentuk program kerja yang lebih terorganisir dengan baik, dilakukan dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.
6. Pelaksanaan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan. Pelaksanaan dalam penelitian ini berfokus

pada Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan peraturan khususnya Lembaga Adat Melayu Riau.

7. Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya melayu di Riau

2.8 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub indikator
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Bab VI pasal 8 Tentang Fungsi LAM Riau	1. Sebagai tempat pendukung utama adat dan budaya Melayu	Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan serta data adat Melayu, seperti : a) Bendawi b) Bukan bendawi
	2. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat	Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu, seperti: a) Lingkungan pendidikan b) Ruang publik
	3. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat	Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu
	4. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik	Memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

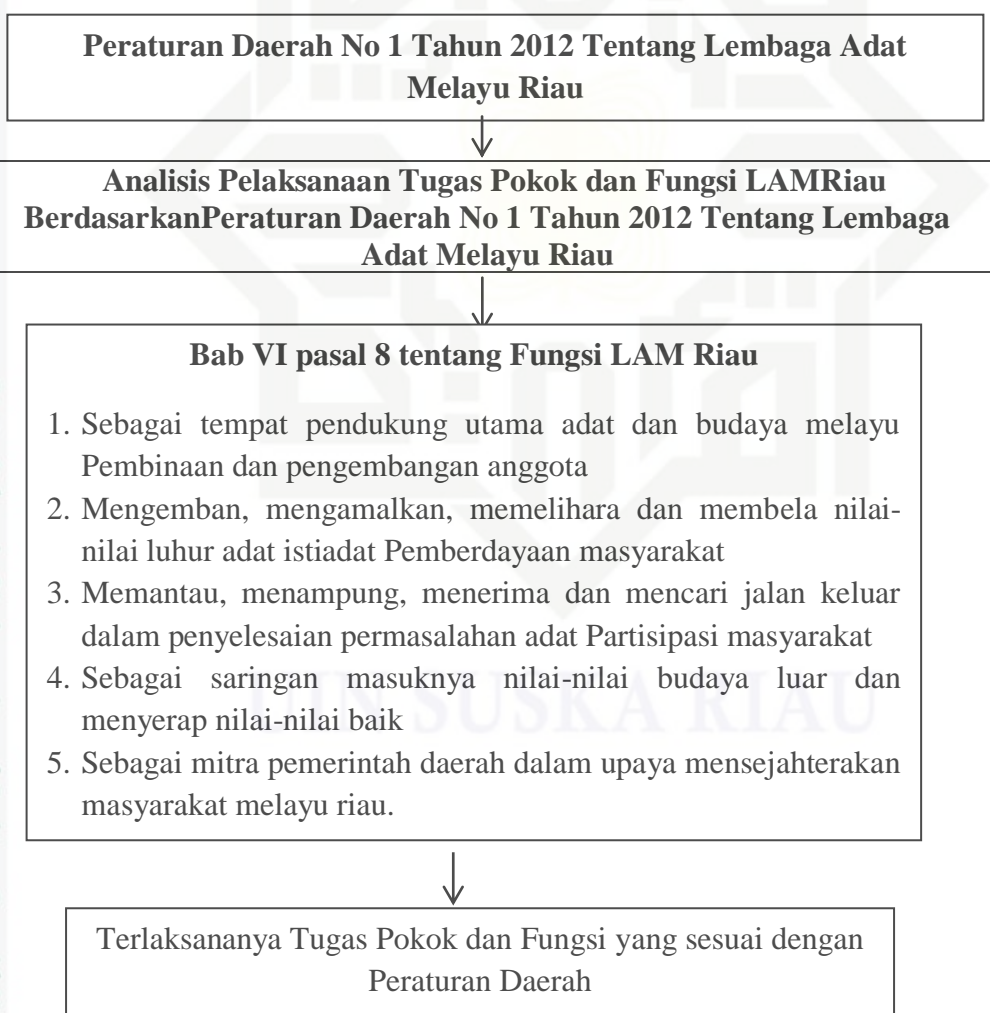
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep	Indikator	Sub indikator
	5. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau.	Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah dengan merevitalisasi hukum dan aturan adat Melayu ditengah masyarakat yang beragam.

Sumber: Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

2.9 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada, maka secara umum penelitian akan dilakukan di Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau yang beralamat di Jalan Diponegoro, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan tempat penelitian karena LAM Riau dapat memberikan informasi terkait dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 di wilayah Provinsi Riau. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai selesai

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni data yang berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini mendeskripsikan permasalahan dan data melalui kata-kata atau kalimat yang saling terhubung sehingga mendapatkan hasil dari penelitian. Dalam (Sugiyono 2017), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai *29*nstrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Selain itu Menurut (Jaya, 2020) penelitian kualitatif lebih memusatkan

perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yaitu variabel. Penelitian kualitatif juga memiliki ciri-ciri Menurut (Rukin, 2019) yaitu sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang berdasarkan pada sumbernya. Jenis dan Sumber data itu ada dua, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung ditempat pelaksanaan penelitian. Data Primer ini dapat berupa opini subjek dan data primer peneliti disini adalah hasil observasi terhadap perilaku atau kejadian dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari media elektronik, media cetak atau perantara. Selain itu data sekunder juga data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu seseorang yang menjadi narasumber yang mengetahui dan memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Datuk Sri H. Al Azhar	Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA)	1
2.	Datuk Sri Drs. Syahril Abubakar, M. Si	Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH)	1
3.	Datuk Zulkarnaen noerdin, SH., MH	Timbal Ketua Dewan Pimpinan Harian	1
4.	Datuk Tarlaili	Sekretaris Majelis Kerapatan Adat	1
5.	Datuk Toni Werdiyansah, S.Si	Penyelaras Bidang Ormas Dan Pengembangan Komunitas Adat	1
Jumlah			5

Sumber: Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Riau tahun 2017-2022 M

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan pengumpulan data yang sesuai dengan fokus dalam penelitian yang peneliti ambil, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan penelitian dengan secara langsung ke lapangan, baik untuk menemukan data atau mengamati masalah yang terkait dengan penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).” Menurut (Albi Anggito, 2018) Wawancara terbagi atas dua kategori,yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara terstruktur

Merupakan wawancara dimana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui pasti informasi yang hendak digali dari narasumber.Peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis dan juga bisa menggunakan instrument penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto dan alat bantu lainnya

b) Wawancara tidak terstruktur

Merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur tunggal.

Wawancara ini bersifat bebas. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kata dasar dokumen yang Menurut (Sugiyono, 2017)“ dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.”Dokumen dapat berupa tulisan seperti (catatan harian,sejarah hidup, biografi dan lain sebagainya), gambar seperti (foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain) atau karya-karya monumental dari seseorang seperti (karya seni, yang dapat berupa patung, film dan lain-lain). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang di ambil dari wawancara dan dokumentasi. Dan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data tersebut kemudian antara satu data dengan data lainnya dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kota Pekanbaru



Gambar 4.1 Peta Lokasi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. (dalam wikipedia)

4.1.1 Geografis

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yakni berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, yang terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk daerah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota yang luas 16 kilometer persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 kilometer persegi dengan 2 Kecamatan yakni Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Perkembangan Kecamatan ini terus dimekarkan hingga pada tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan. (dalam wikipedia)

4.1.2 Demografis

Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan manusia di suatu wilayah atau daerah. Demografis di Kota Pekanbaru dimulai dari kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakatnya yang beragam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Komposisi Agama Di Kota Pekanbaru Tahun 2018

Agama	Jumlah (%)
Islam	84,74
Kristen	9,67
Buddha	4,13
Katolik	1,42
Hindu	0,03
Konghucu	0,01

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Riau 2018

Selain agama yang beragam hal ini diimbangi oleh jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah penduduk (Orang)
2000	587.842
2005	720.197
2006	754.467
2007	779.899
2008	799.213
2010	897.767
2019	954.373

Sumber : Pekanbaru.bps.go.id

Adanya agama yang beragam tentunya akan berpengaruh pada bahasa dan suku yang beragama pula di Kota Pekanbaru, seperti Indonesia, Melayu, Minang, Batak Dan Tionghoa, serta dengan jumlah penduduk yang banyak membuat Kota Pekanbaru di bagi dalam 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Dengan zona waktu WIB (UTC+07:00) dan kode pos 287111.

4.2 Lembaga Adat Melayu Riau



Gambar 4.2 Lembaga Adat Melayu Riau

Lembaga Adat Melayu Riau atau yang disingkat dengan LAM Riau adalah Lembaga Adat resmi yang dibentuk untuk menjaga adat budaya melayu di Provinsi Riau.

4.2.1 Sejarah lahirnya Lembaga Adat Melayu Riau

Lembaga adat melayu (LAM) Riau didirikan pada hari sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau. Pendirinya berasal dari tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi yaitu Pejabat Pemerintahan, Ulama, Ilmuwan/Cendikiawan dari Perguruan Tinggi di Riau, Budayawan, Seniman, Sastrawan dan Orang Patut-Patut yang berasal dari Lingkungan Kekuasaan Tradisional Melayu Riau. Dari kalangan pemerintahan, tokoh utama pembentuk lembaga ini adalah Gubernur Riau waktu itu yakni Arifin Achmad, ia mengatakan bahwa “ perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah lembaga adat

yang menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau.”

Batang terendam ialah jatidiri atau identitas budaya di dalam dinamika ke-Indonesia-an.

4.2.2 Lokasi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ini berlokasi di Jl. Diponegoro 39, Suka Mulya, Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Indonesia. Telfon +62 761 22313, Email: penggawa@lamriau.id/ website: <https://dphlamriau.org/>

4.2.3 Visi Misi, Fungsi, Tujuan dan Tugas Lembaga Adat Melayu Riau

Visi “ Mewujudkan masyarakat adat berbudaya Melayu yang maju adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi “Memperkuat/memperkokoh jati diri masyarakat Melayu dan melindungi, memelihara dan membina hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahirian dan batiniah.

Fungsi LAM Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Bab VI Pasal 8, Fungsi LAM Riau diantaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;
- b) Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c) Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau;
- d) Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatann bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; dan
- e) Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau.

Tujuan LAM Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Bab V Pasal 6, Tujuan LAM Riau diantaranya :

- a) LAM Riau bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.
- c) LAM Riau bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

Tugas LAM Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Bab VII Pasal 9, Tugas pokok LAM Riau diantaranya:

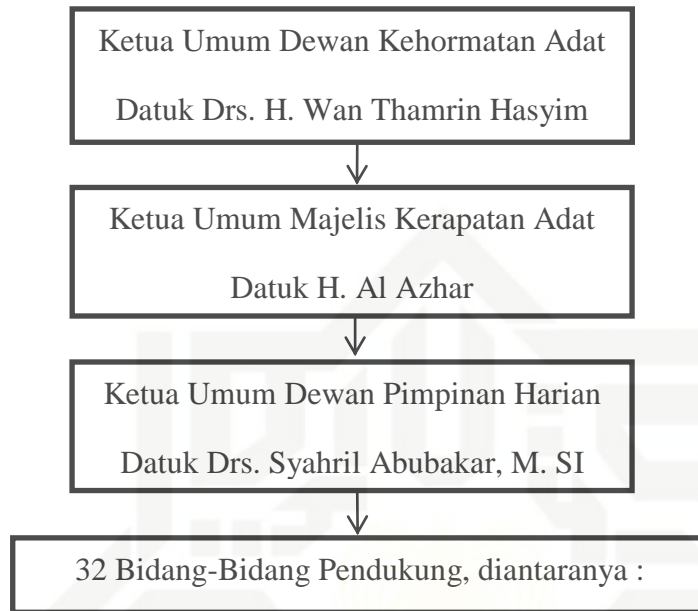
- a) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
- b) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri ke Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
- e) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hal-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.4 Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau



Dewan kehormatan adat (DKA)
Kumpulan Sri Mahkota Diraja Negeri Melayu Riau
Majelis Kerapatan Adat (MKA)
Dewan Pimpinan Harian (DPH)
Bidang Organisas, Kaderisasi Dan Tata Laksana
Bidang Kerjasama Antar Lembaga Dalam Dan Luar Negeri
Bidang Ormas Dan Pengembangan Komunitas Adat
Bidang Pemtakbiran Dan Siasah
Bidang Kesejahteraan Dan Kebajikan Sosial
Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Kerja Tempatan
Bidang Advokasi Hak-Hak Masyarakat Adat
Bidang Perdagangan, Koperasi Dan Pengembangan Usaha
Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kesenian Melayu
Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kuliner Melayu
Bidang Pengembangan Industri Dan Kewirausahaan
Bidang Pengembangan Kajian Islam
Bidang Pendataan Komunitas Dan Khasanah Adat Melayu
Bidang Pelestarian Adat Melayu
Bidang Pembinaan Pengembangan Sastra Dan Seni Melayu
Bidang Penegakan Hukum Dan Perlindungan Masyarakat Adat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Polisi Adat
Bidang Dakwah Dan Keagamaan
Bidang Humas, Publikasi Dan Dokumentasi
Bidang Pemberdayaan Perempuan
Bidang Pengembangan Masyarakat Dalam Lingkungan Perusahaan
Bidang Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam
Bidang Pemetaan Hutan Tanah Masyarakat Adat
Bidang Lingkungan Hidup, Amdal Dan Pembangunan Berkelanjutan
Bidang Pengembangan Pertanian, Agri Bisnis Dan Perkebunan
Bidang Pengkajian, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Melayu
Bidang Perpustakaan Dan Manuskrip Melayu
Bidang Pelatihan Upacara Adat
Bidang Pendidikan, Litbang, Riset Dan Teknologi
Bidang Pemberdayaan Potensi Pertambangan Dan Migas
Bidang Legislasi

sumber : Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Riau Nomor : SK-35/LAMR/XII/2018

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disusun dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau oleh pihak LAM Riau belum maksimal dibuktikan dengan masih banyaknya persoalan adat yang belum dapat di selesaikan oleh LAM Riau sehingga berakhir pada revisi Perda yang sedang dilakukan untuk memperkuat fungsi dan kelembagaan LAM Riau.
2. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAM Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang LAM Riau yakni Belum termuatnya struktur dan bagan Masyarakat Suku Asli, Sultan dan Raja Melayu, serta belum adanya kewenangan LAM Riau seperti menjadi mediator penyelesaian masalah perdamaian yang final, menginventarisasi tanah ulayat, serta mengidentifikasi dan menetapkan struktur perbatinan negeri serta melegalkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan adat Melayu.

6.2 Saran

Secara umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Belum Maksimal, sehingga ada beberapa saran dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk LAM Riau harus lebih tegas dalam melaksanakan tugas pokok sehingga dapat menyelesaikan persoalan adat yang ada, agar LAM Riau bukan hanya sekedar menjadi penengah dalam sebuah persoalan adat namun dapat menetapkan keputusan dan membela hak-hak masyarakat adat Melayu Riau.
2. Untuk LAM Riau harus lebih Memperkuat fungsinya di tengah masyarakat adat yang beragam saat ini, agar fungsi yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Quran

Tafsirq.com : QS. Ali-imran: 104

Tafsirweb.com : QS. Al-Maidah ayat 2

Tafsirq.com : Q.S. At-Taubah: 71

Buku

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: CV Jejak.

Angin, R. (2021). *Dimensi Interaksi Antar Aktor dalam Proses Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Abadi.

Asang, S. (2019). *Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas: Prespektif Organisasi Publik*. Jakarta: Firstbox Media.

Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Bandung: Kencana.

Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata*. Bali: Anak Hebat Indonesia.

Moh. Yunus, A. A. (2021). *Hitam Putih Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Adab.

Mohamad Thahir Haning, H. M. (2021). *PubliC Trust: Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bandung: Unhas Press.

Nugroho, D. A. (2017). *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*. Malang: UB Press.

Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Dari Jenis Hingga Arti Penting*. Malang: Elex Media Komputindo.

Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Jakarta: De La Macca.

Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Uddin B. Sore, S. (2017). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Sah Media.

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: MNC Publishing.

Skripsi/Jurnal

Akhmad Museno, "Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Mekayu Riau." Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. (2019)

Dodi Iskandar, "Implementasi Pasal 6 Pertaturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam pelestarian budaya bahasa melayu di kota Pekanbaru." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. (2020)

Hasanah, "Strategi Humas Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Mensosialisasikan Budaya Melayu Di Provinsi Riau." Skripsi Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. (2019)

Isradana, U. (2019). *Negosiasi Lembaga adat melayu riau kecamatan mandau dengan yayasan raja tawar mula jadi dalam penyelesaian konflik peresmian balai adat batak di kecamatan mandau*. JOM FISIP, 2-3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Website/Internet

Bermadah.co.id: bermadah, *pimpinan DPRD Riau dan LAMR bahas sejumlah persoalan di Riau*. Halaman 1. Diakses Selasa/16/02/2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

Rri.co.id: Revi, *LAM Kepri Tanjungpinang bersilaturahmi ke LAMR*. Halaman 1. Diakses Minggu, 28/02/2021.

Sindonews.com : *Banda Harudin Tanjung, Eks Mendagri Kritik Lembaga Adat Melayu, Sebut Tak Layak Urusi Minyak Bumi*. Halaman 1. Diakses Minggu, 28/02/2021.

www.lamriau.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DRAF WAWANCARA

Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Nama : Nurul Fadilah
Nim : 11775201387
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Narasumber Datuk Toni Werdiansyah (15 Januari 2021)

1. Apakah tujuan awal dibentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang LAM Riau selain sebagai payung hukum?

Jawaban

Lembaga Adat Melayu Riau oleh datuk-datuk terdahulu sebagai wadah berhimpun para tokoh-tokoh melayu. Sebagaimana kita ketahui tepat pada tanggal 09 Agustus 1957 terbentuknya Provinsi Riau yang terdiri dari 8 kabupaten yakni Kampar, Inhu, Inhil, Bengkalis, Riau, Pekanbaru, Kepri dan Dumai. Dikatakan himpunan karena gabungan dari tokoh-tokoh melayu di 8 kabupaten tersebut. Namun saat ini provinsi riau terbagu menjadi 2 provinsi yakni provinsi riau dan provinsi kepulauan riau dan saat ini provinsi riau sudah berjumlah 12 kabupaten kota. Setiap provinsi di sumatera ini termasuk kalimantan sampai negeri semenanjung malaysia kita adalah bangsa melayu dengan perhimpunan melayu dunia yang masih eksis sampai saat ini dengan nama dunia melayu dunia islam, yang artinya jika dikatakan melayu maka pasti islam. Disebabkan kerajaan-kerajaan melayu yang berdaulat kepada NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 menyebabkan seluruh kerajaan kesultanan melayu di nusantara ini selain malaysia menyerahkan kedaulatan kepada NKRI. Sejak tahun 1945 itulah kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang ada seperti kerajaan indragiri, pelalawan, siak dan lainnya, khususnya di Riau ini maka kesultanan melayu tidak lagi memiliki wilayah kekuasaan, karena semua sudah diserahkan kepada NKRI. Sejak tahun 1945 terus berkembang, namun dalam NKRI nilai-nilai budaya, adat mesti dipertahankan oleh generasi penerus bangsa melayu yang khususnya di provinsi riau, oleh karena itu datuk-datuk terdahulu membangun sebuah lembaga adat untuk tempat bersatunya tokoh-tokoh melayu adat ini dengan nama lembaga adat melayu riau. Sebagai payung serta lembaga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terus eksis mempertahankan nilai-nilai budaya kemelayuan itu sendiri. Sesuai dengan perkembangan zaman dan aturan di negeri kita, tentu segala sesuatunya harus berbadan hukum. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah daerah provinsi riau pada tahun 2012 dibuat peraturan daerah tentang lembaga adat melayu riau ini. Ini sebagai wujud bahwa sesuai dengan visi riau 2020 yang dicanangkan oleh bapak serijasad gubernur riau priode 1998 hingga 2003, bahwa pada tahun 1998 zaman reformasi pada saat itu, riau ini memiliki visi menjadi pusat kebudayaan perdagangan melayu. Salah satu wujud mendukung visi ini dengan berdirinya LAM Riau ini, tentunya lembaga yang sesuai dengan aturan yang ada di NKRI. Sejak perda ini disahkan oleh pemerintah maka LAM Riau sebagai organisasi telah memiliki payung hukum. Dengan adanya perda tersebut dapat dibentuk lembaga adat melayu riau kabupaten kota yang berjumlah 12 lembaga di setiap kabupaten kota. Dan ini akan berkembang terus apabila ada pemekaran daerah selanjutnya maka LAM Riau akan menyesuaikan dengan pemekaran yang ada di Riau ini. Oleh karena itu perda ini sangat bermanfaat dan menjadi dasar gerakan secara yuridis kelembagaan LAM Riau ini, sehingga kelestarian adat, mempertahankan adat istiadat, menyelesaikan konflik adat dan tanah ulayat dan pemberian gelar atau pengangkatan datuk-datuk, dengan perda ini terlaksana dengan baik. Jadi selain sebagai payung hukum memang untuk menjamin tidak adanya gerakan desentralisasi atau makar terhadap NKRI sebab apabila dibangkitkan lagi kesultanan dan kerajaan maka akan menjadi sebuah makar terhadap NKRI. Oleh karena itu, yang sesuai dengan aturan di republik kita dalah sebuah lembaga yang mengayomi dan melestarikan adat istiadat melayu yang kita namakan sebagai lembaga adat melayu riau.

2. Didalam perda terdapat 5 fungsi LAM Riau, diantaranya :

- a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya melayu. Upaya apa yang telah dilakukan dan tantangan yang terjadi dalam menjalankan fungsi ini?

Jawaban

LAM Riau sudah melaksanakan tugas fungsi pokoknya dari generasi ke generasi, hingga saat ini ketua MKA datuk seri al azhar dan ketua DPH datuk seri syahril abu bakar, jika dilihat perkembangannya pada saat ini dengan arus globalisasi yang sangat luas dengan muncul nya media sosial mengalami perubahan drastis kehidupan masyarakat dunia khususnya di Riau juga berpengaruh pada sendi-sendi adat di provinsi riau. Dikarenakan arus globalisasi ini seperti batang pohon semakin tinggi diterpang angin semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat akarnya. Jadi LAM Riau sejak tahun 2012 memiliki payung hukum perda yang di pimpin oleh alm datuk tenas efendy dan datuk al azhar, ini hampir seluruh persoalan-persoalan adat di Riau ini tempat mengadunya adalah LAM Riau. Jadi LAM Riau di ibaratkan sebagai pohon besar, daunnya tempat berlindung untuk berteduh, batangnya yang besar tempat bersandar dan akarnya sebagai tempat berselo, artinya telah banyak persoalan-persoalan yang di selesaikan LAM Riau, mulai dari perselisihan tanah ulayat, adat bahkan perkelahian di dunia nyata dan maya antara orang batak dan melayu, LAM Riau lah yang menjadi penengah terhadap persoalan-persoalan itu, Serta persoalan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan sawit dan kertas. Selama ini tanah ulayat memang belum menjadi fokus pemerintah, namun dengan kepemimpinan bapak jokowi datuk seri setia amanah negara 2 tahun lalu telah menerbitkan peraturan presiden tentang tanah ulayat contohnya sinamanenek, Sehingga persoalan antara perusahaan dengan masyarakat adat serta dengan pemerintah dapat diselesaikan. Karena memang kekuasaan negeri-negeri kerajaan kesultanan melayu dulu soal wilayah dan ini sudah di serahkan ke NKRI. Dan saat ini tentunya seluruh tanah itu milik negara namun negara memberikan hak kepada masyarakat terhadap tanah ulayat sesuai aturan yang berlaku. Jadi selain persoalan tanah ulayat terdapat juga perselisihan antar agama ataupun adat LAM Riau menjadi payung hukum untuk tempat bertanya menyelesaikan persoalan yang ada dan mencari solusi. Dan negara masih mengakui hukum konvensional yang ditetapkan oleh lembaga adat, serta lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat seperti pepatah yang besar bisa di kecilkan dan yang kecil bisa di hilangkan. Jika yang melanggar ketentuan adat akan dikenakan sanksi adat berupa potong kerbau, diusir dari kampung bahkan perang antar suku di negeri melayu ini. Jadi fungsi-fungsi di dalam perda tidak dapat di evaluasi dalam waktu singkat, namun hal itu menjadi dasar lam riau untuk menjalankan fungsinya, jika dinilai 5 fungsi tersebut sudah berjalan baik dengan bukti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hampir seluruh aparatur negara dana masyarakat di negeri ini semuanya beraudiensi ke LAM Riau baik silaturahmi, menyelesaikan masalah atau meminta petuah. Bukan hanya dari kalangan internal orang melayu tapi juga pihak pemeirntah dan pihak swasta.

- b. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat Pemberdayaan masyarakat. Upaya apa yang telah dilakukan dan tantangan yang terjadi dalam menjalankan fungsi ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban

kita sudah melihat nama-nama jalan dan penulisan pemerintahan itu dengan tulisan arab melayu, karena melayu ini tulisan dasarnya arab dahulu, namun sejak penjajah masuk bahas latin yang kita gunakan saat ini. Maka pada dasarnya tulisan melayu itu adalah tulisan arab, namun bahasanya bukan bahasa arab tapi melayu sehingga kita namanya bahasa arab melayu. Hal ini tentu bisa di beri contoh dulu kepada masyarakat yaitu di plang-plang kantor pemerintah. Target besar LAM Riau dan kita semua di riau ini,kita berkeinginan seluruh plang nama jalan,nama toko dan perusahaan kita harapkan bertulisan arab melayu. Sehingga cerminan negeri melayu ini adalah tulisan arab melayu. Dalam bidang pendidikan adat budaya melayu sudah ada yang dinamakan pelajaran arab melayu ini. Pemerintah juga telah membuat lomba-lomba arab melayu, baik tulisan arab melayu maupun tanya jawab tentang arab melayu. Jadi muara pada pengembangan kelestarian adat melayu pada bidang pendidikan ini masuk adat melayu riau ini di kurikulum dengan nama muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi memang perlunya sinergitas kita semua untuk melestarikan adat budaya melayu ini.

- c. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat Partisipasi masyarakat

Jawaban

Banyak permasalahan yang telah terjadi namun kita sangat bersyukur karena LAM Riau ini ada, karena masyarakat tahu tempat kemana mereka harus mengadu. LAM Riau dari dulu terus berjuang untuk membela masyarakat untuk mempertahankan tanah ulayat hingga harus melawan perusahaan yang di dukung oleh aparat negara seperti kepolisian. Namun permasalahan di riau ini sudah menemukan titik terang, pembelaan dari negara terhadap hak-hak persoalan adat, dengan langkah awal mengesahkan LAM adat tentang sinamanenek. Persoalan yang dapat diselesaikan oleh LAM Riau tentu akan di selesaikan namun jika membutuhkan peraturan yang lebih tinggi dari negara tentu LAM Riau akan berjuang agar peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah.

- d. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik.

Jawaban

Secara keseluruhan kita tidak memiliki kekuatan untuk membatasi arus budaya dari luar,karena teknoogi informasi ini sudah masuk ke rumah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampul dengan gadget. Jika kita lihat saat ini budaya saling tukar menukar saat ini antara budaya timur dengan budaya barat. Salah satu yang telah dilakukan pemerintah korea utara dengan cara mengkarantina arus informasi kepada rakyatnya. Apakah ini dapat dilakukan oleh presiden kita? Sementara sejak zaman orde baru kita sudah di doktrin dengan satu siaran tv, namun terjadi pergolakan yang besar. Ataukah kita bisa seperti cina yang memiliki nama lain google nya sendiri sehingga bisa di kendalikan oleh pemerintahan sendiri. Namun yang bisa kita lakukan adalah memasukkan kurikulum adat melayu kepada anak sekolah, serta kegiatan masyarakat atau organisasi dengan pembukaan acara tari zapin dan pantun dengan tujuan untuk mempertahankan adat melayu ini. Serta meningkatkan sosialisasi dan peran pemerintah serta kepala keluarga untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan adat. Karena hal yang tidak di sadari sebenarnya adalah bahwa terjadi peningkatan keimanan dan pengetahuan yang tinggi terhadap islam itu sendiri, sebab mencari ilmu itu dahulu sulit namun dengan adanya teknologi informasi yang mudah dicapai semua tidak sulit dengan membuka semua situs agama yang ada.

- e. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melayu riau

Jawaban

Seperti yang sudah saya katakan tadi, bentuk mitra kerjasama kita dengan pemerintah daerah yakni melalui bidang pendidikan bahkan dengan dinas kebudayaan untuk menjaga barang-barang peninggalan melayu yang ada di riau ini.

3. Apakah penyebab LAM Riau melakukan revisi perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau?

Jawaban

Sejak di sahkannya perda ini tentu masih banyak perlu revisi, karena memang dunia ini terus berkembang, masyarakatnya terus bertambah, dinamikanya semakin tinggi, tantangan mempertahankan adat melayu semakin besar serta perselisihan antar adat itu tetap ada, serta salah satu goal perjuangan orang-orang melayu ini bahwa blok rokan akan habis pada tahun 2021 maka kami sudah secara masif menyampaikan kepada pemuda dan masyarakat untuk mengambil kembali blok rokan dari amerika. Tentu perjuangan ini bukan hanya dilakukan LAM Riau namun juga puak-puak melayu, sehingga orang-orang melayu bisa mengelola minyaknya sendiri serta mensejahterakan orang-orang riau, karena devisa terbesar ini ada di blok rokan.

4. Bagaimana perkembangan LAM Riau setelah peninggalan datuk tenas efendy yang diketahui sebagai budayawan melayu?

Jawaban

Beliau adalah titik tengah antara orang-orang dahulu dengan sekarang. Sejak hadirnya beliau ini grafiknya jauh meningkat, karena beliau mampu mencitrakan, menjadi teladan, mampu menuangkan alam pikir dan tutur katanya sesuai dengan adat melayu itu sendiri. Kita memang memiliki banyak tokoh-tokoh melayu, namun sampai saat ini kita tidak memiliki tokoh yang seperti datuk tenas efendy.

Narasumber Datuk Tarlaili (05 Februari 2021)

1. Apakah tujuan awal dibentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang LAM Riau selain sebagai payung hukum?

Jawaban

Selain sebagai payung hukum, keberadaan lembaga adat ini secara resmi harus di akui. Jika telah ada payung hukum pada kondisi tertentu banyak hal yang diharapkan dengan hadirnya perda ini termasuk kita ini mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga adat ini ada aturan karena ini di jelaskan di dalam perda ini. Jika kita lihat dahulu payung hukumnya belum ada, waktu itu namanya masih lembaga adat daerah riau, jadi diseragamkan menjadi lembaga adat melayu riau. Dahulu lembaga adat daerah riau ini juga termasuk dalam kabupaten kota sehingga terlihat seragam. Jadi inilah rujukan masyarakat daerah riau melalui LAM Riau

2. Didalam perda terdapat 5 fungsi LAM Riau, diantaranya :

a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya melayu. Upaya apa yang telah dilakukan dan tantangan yang terjadi dalam menjalankan fungsi ini?

Jawaban

Jika terjadi persoalan-persoalan di masyarakat adat antar sesama masyarakat adat ataupun kepada perusahaan, sehingga mereka datang ke LAM untuk mengadu dan kita memberikan bantuan. Serta kita sudah turun mendata masyarakat melayu yang dianggap sebagai suku asli seperti suku sakai, talang mamak, anak rawa, bonai dan suku lainnya ada di provinsi ini, yang mana mereka belum tau bahwa ada lembaga adat melayu riau kini sudah mengetahui adanya lembaga ini. Dan saat ada acara perwakilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mereka kami undang ke sini seperti pemberian gelar ataupun tepuk tepung tawar. Namun dengan begitu tantangan yang terjadi yakni dengan kondisi mereka yang jauh untuk datang ke pekanbaru dan memerlukan biaya yang cukup, namun kita ketahui secara ekonomi mereka masih kurang memadai untuk memiliki kas sebagai alat untuk berlalu lalang ke pekanbaru. Kesiapan finansial dan jarak tempuh yang jauh membuat ini menjadi kendala.

- b. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat Pemberdayaan masyarakat. Upaya apa yang telah dilakukan dan tantangan yang terjadi dalam menjalankan fungsi ini?

Jawaban

Untuk membela masyarakat adat kita memiliki LBH lembaga bantuan hukum. Yang ketika masyarakat memerlukan bantuan hukum karena selama ini hak hak masyarakat adat tidak terselesaikan oleh ninik mamak dan perangkat adat yang ada di suatu wilayah tersebut, kita berikan bantuan baik itu secara mediasi di LAM sendiri, maupun menurunkan bantuan hukum sendiri. Dalam membela masyarakat adat tantangan yang terjadi internal masyarakat adat pecah yang sebagian datuk-datuk telah memiliki kepentingan masing-masing. Misalnya jika ada persoalan masyarakat adat terhadap tanah ulayat kepada perusahaan disaat LAM berjuang membela kepentingan masyarakat, datuk-datuk tersebut sudah dipecah oleh pihak perusahaan berubah atau diberikan lahan atau janji-janji mereka berubah. Inilah tantangan yang selalu dilakukan perusahaan untuk memecah konsentrasi sebuah perjuangan untuk sampai ketujuan perjuangan.

- c. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik.

Jawaban

Upaya yang telah kita lakukan adalah dengan MULOK (muatan lokal). Seperti pepatah adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah, jadi kita dahulu jika mandi memakai pakaian di sungai, tempat laki-laki di sini dan perempuan di tempat yang lain dan jika kita berjalan dengan tidak beriringan dengan laki-laki dan perempuan, menghargai orang tua, guru ngaji, namun sekarang kita lihat semua berlalu dengan begitu saja sehingga kita tidak peduli dengan kondisi yang terjadi, hal inilah kita mengingatkan kembali dengan generasi penerus pada pelajaran muatan lokal dengan budaya-budaya kita yang dahulu. Namun tantangan yang terjadi dalam

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyaring nilai budaya adalah guru-guru belum sepenuhnya memahami budaya melayu, sebab di riau ini cukup banyak suku.

- d. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melayu riau

Jawaban

Upaya yang telah kita lakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah dalam membuat peraturan daerah untuk mensejahterakan masyarakat adat, usaha yang dilakukan LAM, bantuan yang harus dilakukan lembaga adat untuk kabupaten kota yang terkadang tidak mendapatkan bantuan untuk menghidupkan organisasi lembaga adat. Jika LAM Riau mendapatkan bantuan melalui peraturan daerah ini, LAM dapat memberikan bantuan kepada lembaga di kabupaten kota tersebut.

3. Apakah penyebab LAM Riau melakukan revisi perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau?

Jawaban

Setelah melalui kajian petinggi LAM ada poin-poin yang perlu dimasukkan ke dalam perda ini, supaya lebih sempurna sehingga sesuai dengan perkembangan saat ini, baik itu struktur maupun bagan nya perlu di sesuaikan. Hal ini juga sampai kepada masyarakat adat suku asli yang belum termuat maka akan di masukkan, serta sultan dan raja-raja yang harus masuk ke dalam perda ini, karena di daerah lain sultan dan raja itu dapat bantuan namun di riau belum ada, sehingga inilah yang dilakukan LAM agar sultan dan raja mendapatkan bantuan saat melakukan agenda di sini baik itu transportasi dll. Jika tidak ada payung hukum tentu nanti akan menjadi masalah.

4. Bagaimana perkembangan LAM Riau setelah peninggalan datuk tenas efendy yang diketahui sebagai budayawan melayu?

Jawaban

Untuk pemikiran seperti datuk tenas tentu sulit kita untuk mendapatkannya, dan mungkin itu tidak ada lagi, karena yang kita ketahui sopan santun ilmunya tentang budaya melayu, siapapun yang mau datang dan berdiskusi beliau membuka diri tanpa melihat suku dan budaya. Namun secara organisasi pondasi-pondasi yang telah di berikan beliau kepada LAM Riau berjalan dengan baik hingga saat ini. Pemikiran beliau luar biasa, ratusan buku beliau buat mulai dari buku tipis hingga tebal lengkap hingga buku tunjuk ajar budaya melayu itu lebih lengkap tentang pemikiran beliau yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Narasumber Datuk Zulkarnaen Noerdin (20 Februari 2021)

1. Apakah tujuan awal dibentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang LAM Riau selain sebagai payung hukum?

Jawaban

LAM ini lahir secara formal pada tahun 70 an jauh sebelum ada perda ini. Namun eksistensi LAM ini yang tidak di dukung oleh satu regulasi yang bersifat yuridis formal, maka dalam perjalanan nya tentu ada persoalan-persoalan, misalnya pada tahun 2000an itu lahir satu regulasi dari kementerian keuangan yang namanya bantuan sosial itu atau hibah tidak dapat diberikan berturut-turut, hal ini benar dan sangat rasional. Namun masalahnya sebuah organisasi yang berbentuk LAM Riau seperti ini yang tentunya sangat banyak kontribusinya terhadap pembangunan bangsa ini khususnya provinsi ini, hal ini tidak ironis jika pemerintah tidak membantu jalannya lembaga ini. Untuk mengatasi inilah kita lindungi dengan perda, jangan sampai nanti tokoh-tokoh riau yang duduk di LAM Riau nanti ada temuan di BPK karena diberikan bantuan walaupun yang diberikan bantuan bukan person tapi LAM nya. Oleh karena itulah salah satu muatan LAM kita sebutkan sumber dana LAM itu berasal dari APBN, APBD provinsi kabupaten kota dan pendapatan lain yang sah dan halal. Dilain sisi perkembangan zaman timbul kekhawatiran kita jika tidak dilindungi oleh satu hukum positif di masing-masing daerah atau daerah yang sama membentuk LAM tandingan, nanti jika tidak terpilih ketua LAM mereka membentuk LAM baru, nah ketika perda ini telah lahir tidak ada lagi kemungkinan lahir LAM yang seperti itu yang menjadi kompetitor, hal ini bukan berarti kita membonsai demokrasi mereka tidak boleh berkreasi, namun selagi yang namanya lembaga adat melayu riau ya hanya satu. Serta kita juga berharap selama ini LAM ini di anggap persepsinya itu yang namanya budaya melayu berpantun, bepakaian melayu, padahal sebenarnya LAM selain mengatur hal-hal seperti itu tapi juga ada nilai di situ seperti nilai kejujuran, nilai kebersamaan, nilai gotong royong dan nilai nilai yang tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat, oleh karena itu kita formalkan dalam perda ini, dengan harapan LAM semakin memberi kontribusi terhadap perkembangan budaya melayu. Misalkan hari ini alhamdulillah dengan adanya perda ini LAM berkontribusi dengan pemerintah provinsi riau dalam hal ini dinas pendidikan memberikan pemahaman sedini mungkin kepada anak-anak sekolah mulai dari tk, sd, smp dan sma dengan muatan lokal atau MULOK budaya melayu riau, hal ini bisa dilakukan karena adanya perda ini, jika bicara soal mulok, faktor kompenen yang mendukung misalnya

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku pegangan hal ini bicara soal dana juga di masing-masing instansi seperti diknas, apabila LAM ini tidak dilindungi oleh aturan hukum positif yang akhirnya eksistensinya di ragukan maka itu sangat sulit sekali untuk bekerjasama dengan pemerintah provinsi riau. Kemudian substansi dari perda ini menyangkut soal hak protokoler, baik di DPRD atau pemprov, itu biasanya jika LAM di undang tidak jelas posisi duduknya dimana, seperti sepele namun ini penting menurut hemat kami, karena LAM ini seharusnya di tinggikan seranting di dulukan selangkah, oleh karena itu eksistensi ini juga mengatur soal misalkan sekarang itu rapat paripurna di DPRD, LAM bersama-sama ada di sana, kalau dulu LAM berada di jauh.

2. Didalam perda nomor 1 tahun 2012 tentang lamr ini terdapat lima fungsi lamr, apakah seluruh fungsi tersebut sudah berjalan dengan semestinya hingga saat ini atau belum?

Jawaban

Alhamdulillah LAM Riau yang mengacu pada perda tersebut sudah berjalan namun belum maksimal, seperti misalkan di situkan disebutkan LAM ini kita formasikan seperti dewan pertimbangan agung dulu, yang memberikan masukan baik diminta ataupun tidak kepada pemerintah provinsi riau, hal ini mungkin belum berjalan maksimal, namun bukan berarti hal ini tidak berjalan.

3. Apakah penyebab LAM Riau melakukan revisi perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau?

Jawaban

Kita sadari bahwa saat membuat perda ini di indonesia belum ada perda yang mengatur lam seperti itu dan kita yang pertama kali, yang saya sendiri saya sebagai inisiator dan ketua badan legislasi di DPRD Riau maka kita lahirkanlah perda ini. Namun dalam perjalanannya terasa kelemahan dan kekurangan diantara lain LAM itu harus di perkuat dengan hak untuk melakukan sebagai mediator atau mediasi, jadi jika ada persoalan masalah adat baik antar perorangan ataupun kepada perusahaan tentang tanah ulayat, ini lebih dahulu diselesaikan di LAM ini. Di perda sebelumnya hal ini tidak ada, dan sekarang revisi ini kita harapkan ada di dalam perda ini, jadi LAM ini sebagai mediator penyelesaian perdamaian yang final, final dalam arti jika ada salah satu pihak yang tidak senang dapat menggugat ke pengadilan. Selama ini memang konstitusi atau undang-undang kita memang mengatur soal pemberian hak potong atau hak adat termasuk undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang agraria tanah ulayat, namun dalam perjalanan tidak seindah yang di bayangkan, ternyata peraturan turunannya itu ada PP yang mengatur, harus ada batas dan lain

sebagainya. Kita berharap LAM ini diberi kewenangan untuk menginventarisasi tanah-tanah ulayat itu bersama dengan pemerintah provinsi riau, selama ini tidak. Inventarisasi misalnya nanti dari sekian tanah, tanah ulayat itu di sini seperti itu, di perda no 1 tahun 2012 belum tercantum hak untuk menginventarisasi, sekarang itulah yang sedang berjalan untuk di revisi DPRD. Revisi ini juga memperkuat fungsi dan kelembanggaan ini.

4. Bagaimana perkembangan LAM Riau setelah peninggalan datuk tenas efendy yang diketahui sebagai budayawan melayu?

Jawaban

Untuk menjadi baik itu pertama sistem yang dituangkan dalam bentuk aturan, kedua orangnya yang juga berpengaruh. Itulah bedanya kita dengan perangkat instansi lainnya karena memang kewibawaan serta pengaruh seorang pemimpin dalam LAM ini luar biasa. Orang yang dituakan dan dianggap memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Memang kita merasakan kehilangan namun bukan berarti fungsi LAM itu hilang sama sekali, tidak. Fungsi itu terus berjalan memberikan kontribusi terhadap perkembangan adat di riau ini dan nilai-nilainya. Tapi tentunya kita berharap lahirnya datuk tenas efendy yang lainnya, namun seperti datuk al azhar mendekati dengan kewibawaannya, kemampuannya terhadap kebudayaan serta integritas diri juga luar biasa.

Narasumber Datuk Syahril Abu Bakar (20 Februari 2021)

1. Apakah tujuan awal dibentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang LAM Riau selain sebagai payung hukum?

Jawaban

Selain sebagai payung hukum juga sebagai pedoman kita dalam menjalankan roda organisasi ini.

2. Didalam perda nomor 1 tahun 2012 tentang lamr ini terdapat lima fungsi lamr, apakah seluruh fungsi tersebut sudah berjalan dengan semestinya hingga saat ini atau belum?

Jawaban

Dalam penyelenggaraan fungsi ini kita masih mengalami kendala, seiring dengan perkembangan zaman dan diakui oleh tanah adat atau ulayat maka semakin ramailah orang yang ingin menjadi pemangku adat, jika dia menurut alur dan patut tidak ada masalah artinya sesuai dengan mekanisme dan persyaratannya. Tapi yang menjadi masalah mereka tidak melaksanakan ini sesuai dengan alur itu, contohnya hari ini sudah banyak orang yang mengaku sebagai pemangku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat di perbatian di kenegerian, sehingga tak jarang kita dengan dualisme pemangku adat, ada juga contohnya di LAM kota ini alih-alih orang membuat MUSDA LAM adat kota pekanbaru, sementara kami yang di provinsi sebagai penanggung jawab tertinggi tidak ada melaksanakan itu, sementara itu adalah kewenangan provinsi jika ingin mengadakan MUSDA, tidak kewenangan sekelompok orang. Hal-hal ini lah yang dahulu belum di atur, mulai dari identifikasi, verifikasi dan validitasi pada masyarakat hukum adat itu, pada perda ini belum di atur. Maka kedepan ini yang perlu di revisi dan sempurnakan, supaya hal-hal seperti ini bisa di atur regulasinya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum positif ataupun hukum adat. Jadi LAM kedepan juga akan berfungsi sebagai yang berhak mengatakan musyawarah adat itu ada dan sah atau tidak, seperti kesbangpol atau depertemen kemenkumham untuk perusahaan-perusahaan.

3. Apakah penyebab LAM Riau melakukan revisi perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau?

Jawaban

Tentunya memang banyak kendala serta belum mengatur kesemua aspek, baru sedikit yang di atur, sementara sesuai dengan perkembangan zaman banyak hal-hal yang kita temui di lapangan yang dahulunya belum diatur atau yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga perlu untuk di perbarui, di sempurnakan dan ditingkatkan, supaya kita dalam menjalani organisasi ini tidak mengalami hambatan.

4. Bagaimana perkembangan LAM Riau setelah peninggalan datuk tenas efendy yang diketahui sebagai budayawan melayu?

Jawaban

Semakin bagus dan berkembang, karena datuk tenas sebagai pemimpin sebelumnya sudah meletakkan dasar-dasar ataupun pondasi untuk lembaga adat ini untuk eksis terus kedepannya. Pada era kepengurusan beliau lembaga adat punya anggaran dasar rumah tangga, peraturan daerah, perda tentang pengakuan tanah ulayat dan pemanfaatannya, hal ini sudah berjalan dengan baik dan lembaga adat juga sudah tersusun tunjuk ajar melayu yang dibuat beliau dahulu. Sehingga era ini tinggal berjalan kedepan, LAM ini bukan hanya mengurus kesenian dan budaya tetapi juga mengurus adat dalam artian keseluruhannya.

Narasumber Datuk Al-Azhar (20 Februari 2021)

14. Apakah tujuan awal dibentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang LAM Riau selain sebagai payung hukum?

Jawaban

Payung hukum bahwa lembaga adat ini diakui di dalam kerangka peraturan perundang-undangan daerah. Jadi dengan pengakuan formal itu maka lembaga adat melayu riau ini berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, karena lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dan merupakan bagian yang menyatu dengan tugas-tugas pemerintahan di daerah ini. Jadi lembaga ini berbeda dengan LSM yang berfokus pada swadaya.

15. Didalam perda nomor 1 tahun 2012 tentang lamr ini terdapat lima fungsi lamr, apakah seluruh fungsi tersebut sudah berjalan dengan semestinya hingga saat ini atau belum?

Jawaban

Banyak yang sudah dilakukan LAM Riau sejak 50 tahun usia LAM Riau dengan penerapan perda 8 tahun terakhir. Namun ada beberapa hal yang strategis, tujuan organisasi itu kita fokuskan pada tiga hal, diantaranya:

- Pelestarian, pelestarian ini berarti perlindungan, penggalian pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya, sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat melayu. Pada aspek ini kita memiliki program strategis yang disebut dengan program penanaman nilai internalisasi, nilai-nilai adat dan sosial budaya melayu. Hal ini diwujudkan dengan dua cara yakni melalui pendidikan muatan lokal di sekolah-sekolah dan pengembangan muatan lokal di ruang umum atau publik. Jadi pelestarian bagi kita bermakna internalisasi, penanaman kembali nilai-nilai budaya, sosial dan adat kepada generasi muda. Jadi rupa diluar boleh berubah, namun di dalam nilai adat tidak berubah dan kekal.
- Mewujudkan masyarakat adat berbudaya melayu yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani dalam NKRI. Ini kita wujudkan dengan bermitra dengan pemerintah, program-program pembangunan pemerintah hendaklah memperhatikan masyarakat adat sebagai inti dari pemangku dan pengembang budaya melayu di sini. LPJMD gubernur riau sekarang menyebutkan budaya melayu menjadi payung di negeri ini, oleh karena itu kelompok masyarakat adat melayu itu bagian inti dari kita untuk menegaskan budaya melayu itu sebagai payung di negeri ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memelihara dan membina hak-hak masyarakat adat melayu riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat melayu riau. Hal ini kita wujudkan paling tidak pada delapan tahun terakhir ini yakni dengan cara mengidentifikasi, memverifikasi dan meminta kembali hak-hak masyarakat adat yang selama ini sudah diambil atau terambil, dirampas atau terampas oleh orang atau pihak lain. Oleh karena itu kita melakukan identifikasi terhadap wilayah adat yang mana, siapa yang sekarang sudah menggunakannya dan di atas wilayah tersebut sekarang ada apa, karena ini adalah hak konkrit, hak atas teritorial masyarakat adat. Kemudian setelah diidentifikasi, sekarang sudah banyak wilayah yang menjadi kebun sawit, konsesi akasia dan minyak, pemanfaat itu namun posisi masyarakat adat dimana? padahal secara kultural dan kesejarahan itu adalah hak masyarakat adat, namun secara legal itu adalah hak negara. Pertanyaannya sekarang masyarakat adat ini mendapatkan apa? karena itulah LAM Riau ini sejak pertengahan tahun 2017 sadar bahwa pada tahun 2021 ini blok rokan itu berakhir kontraknya dengan chevron, maka kita sudah melakukan diskusi-diskusi di sini bagaimana supaya ketika terjadi perpanjangan atau alih kelola blok rokan maka kita ingin agar pemilik wilayah itu secara kultural mendapatkan hasil dari pemanfaatan wilayah mereka. Tidak bisa seperti yang selama ini terjadi, sudah hampir 100 tahun minyak riau ini di eksploitasi tapi kelompok masyarakat adat bonai itu tetap menjadi kelompok masyarakat adat yang tertinggal dibandingkan dengan bukan hanya kelompok masyarakat adat lainnya bahkan dibandingkan dengan pendatang. Kelompok masyarakat adat sakai itu sebagian besar masih berada dibelakang dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita sekarang memperjuangkannya agar kita mendapatkan hasil yang lebih dari pemanfaatan atas teritorial, jangan hanya musibah saja yang kita terima seperti asap di musim kemarau, banjir di musim hujan dan limbah B3 berserakan. Chevron ini meninggalkan jutaan matriks ton tanah terkontaminasi minyak, nah siapa yang terancam di sini? kita orang riau, siapa yang dekat dengan itu? ya sebagian besar masyarakat adat kita yang berada di lokasi-lokasi tanah terkontaminasi minyak, mereka terancam dengan bencana-bencana yang akan datang, hasilnya tidak dapat namun bencananya mereka rasakan. Jadi kita melalui tujuan ini ingin agar masyarakat adat kita tidak diposisikan sebagai sapi perahan dan sebagai korban. Kita mau masyarakat adat kita hidup sejajar dengan saudara-saudaranya yang lain. Karena dari 70 persen penduduk riau yang miskin hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sebelum pandemi, 80 persen itu adalah masyarakat adat yang hidup di kawasan-kawasan yang kaya dengan sumber daya itu. Gejala dan fenomena ini tidak pernah di bahas hingga bangku perkuliahan, sehingga terlihat mahasiswa/i terlihat seperti apatis, padahal riset ini tidak pernah masuk ke ruangan kuliah kalian, nah ilah yang menjadi persoalan saat ini. Jadi jika ditanya apa relevansinya kita memperjuangkan tanah ulayat, hak-hak masyarakat adat ya karena faktanya masyarakat ada kita hidup dalam ketertinggalan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan.

Jadi ada tiga fokus utama kita namun hal ini bukan berarti kita meninggalkan adat istiadat seperti tepuk tepung tawar, upacara adat yang tetap berjalan sebagai ekspresi dari nilai-nilai adat sosial dan budaya. Namun juga persoalan-persoalan hak masyarakat seperti hak kultural, ekonomi, ekosistemnya itu melekat kedalam adat. Namun apakah arti tepuk tepung tawar yang penuh dengan simbol-simbol ekologis jika ruang kenyataannya hancur lebur. Masih bisakah kita bercerita tentang padi jika tempat berladang mereka tidak ada lagi, akhirnya adat itu menjadi sesuatu yang nostalgik, bukan sebuah realitas apalagi kenyataan. LAM Riau tidak menginginkan hal seperti ini, melalui perda inilah kita ingin keindahan-keindahan adat kita harmoni dengan sesama manusia dan sesama makhluk lainnya, namun lingkungannya sudah berubah sedemikian rupa. Inilah peranan yang dimainkan LAM 10 tahun terakhir, bukan berarti kita meninggalkan pakaian melayu atau yang lain, itu terus berjalan dan pewarisannya, internalisasinya, penanamannya itu strategi kita melalui muatan lokal budaya melayu. Sekarang kita kaffahkan menjadi penanaman nilai-nilai adat sosial budaya melayu. Mulok ini ada di dalam perda penyelenggaraan pendidikan dengan nama muatan lokal wajib budaya melayu riau.

16 Apakah penyebab LAM Riau melakukan revisi perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau?

Jawaban

LAM Riau akan merevisi perda bagian substansinya. Undang-undang dasar 1945 mengakui, menghormati dan melindungi nilai-nilai dan hukum adat pada pasal 18I. Tetapi persoalannya untuk masuk ke kerangka peraturan perundang-undangan itu ada sejumlah tahap, dan kewenangan tahapnya itu berada di kabupaten kota atau provinsi. Jadi kita menyebutkan kedaulatan adat itu diakui di dalam undang-undang apabila keberadaan mereka di kukuhkan oleh perda kabupaten atau kota. Kabupaten kota kita maupun provinsi kecuali kabupaten kampar itu tidak ada yang mau menyusun perda ini, akibatnya secara historis dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kultural masyarakat adat itu ada, namun secara legal formal dalam ketatanegaraan Indonesia sebagian ada diakui sebagian tidak. Jika kita melakukan survei apa sebabnya kabupaten kota tidak mau memperdakan itu, hambatan mereka antara lain mengidentifikasinya sulit, karena itu revisi perda tadi kita meminta ada kewenangan yang ditambahkan ke LAM untuk melakukan identifikasi tentang masyarakat adat, struktur kepemimpinan masyarakat adat, wilayah adatnya dan aturan-aturan adat yang masih berlaku, hal ini sebagai titik awal bagi Pemkab dan Pemprov untuk melangkah untuk pembentukan perda tentang masyarakat adat. Inikan tidak diatur di dalam perda 1 tahun 2012, tidak ada kewenangan itu dan kita meminta adanya kewenangan itu. Karena tidak bisa kelompok masyarakat adat ini kita deskripsikan satu perbatinan yang mewakili dari tigabelas perbatinan sebab ini bukan homogen, sehingga seluruh perbatinan ini harus di deskripsikan satu persatu. Namun hal ini pernah deskripsikan tapi hanya sebagai referensi, yang kita inginkan hasil riset ini sebagai dasar untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jadi artinya penguatan terhadap upaya kita memelihara dan membina hak-hak masyarakat adat melayu Riau. Karena LAM ini konfederasi, setiap kelompok masyarakat adat punya ke khususannya masing-masing dan kita hormati.

17 Bagaimana perkembangan LAM Riau setelah peninggalan datuk tenas efendy yang diketahui sebagai budayawan melayu?

Jawaban

Jelas kita merasa kehilangan dan beliau tidak tergantikan oleh siapapun. Namun apa yang dapat dikerjakan beliau sendiri dahulu, sekarang kita kerjakan bersama-sama. Beliau memang sudah tidak ada namun roh dari gagasannya itu hidup dan kita mau mengwujudkannya. Tunjuk ajar melayu beliau sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional. Tunjuk ajar itu menjadi bagian yang sangat penting dari muatan lokal budaya melayu Riau ini. Beliau sudah melahirkan buku yang sangat penting, namun buku hanya tinggal sebuah buku apabila tidak ada orang yang membukanya. Sepenting apapun buku dia hanya akan tetap menjadi hiasan rak jika kita tidak datang ke sana untuk membukanya. Sepeninggal beliau kita membuka dan membacanya kemudian menggerakkan pewarisannya melalui muatan lokal budaya melayu Riau. Warisannya itu bukan untuk nostalgia tapi kita dorong sebagai kenyataan yang hidup. Kita meneruskan dan melanjutkan, tapi dunia sudah berubah namun nilainya tetap sama dengan cara yang berbeda-beda. Kita ingin budaya melayu menjadi gaya hidup di Riau ini bukan hanya oleh budak-budak melayu tapi juga oleh orang melayu. Budaya melayu, budaya yang inklusif, kita tidak pernah menolak orang datang, tamu yang datang secara

simbolik kita berikan sirih, tamu berkata kami bukan orang melayu, namun ketuku batang ketakal ketiga keladi moyang, sesuku kita seasal se nenek kita semoyang kata orang melayu, artinya kalian menjadi kita, kamu menjadi saya. Kata kita artinya kita sudah memberikan tempat di hati kita untuk kehadiran orang lain, ini indahnya budaya melayu, itu relevannya budaya melayu dengan zaman kini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau



- Ketua Umum Dewan Pengurus LAMR H.M. Azaly Djohan, S.H (kiri) bersama Ketua DPRD Riau Drs. H Djohar Firdaus, Ketua Badan Legislasi DPRD Riau H. Zulkarnaen Noerdin, S.H, M.H dan Wakil Ketua Badan Legislasi A.Kirjuhari membahas mengenai Ranperda tentang LAMR, 17 November 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Suasana Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Penyampaian Ranperda tentang Lembaga Adat Melayu Riau, di Ruang Paripurna DPRD Riau, Jumat, 18 November 2011.



- Suasana Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus terhadap Ranperda tentang Lembaga Adat Melayu Riau, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis, 22 Desember 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Ketua DPRD Riau Drs. H. Djohar Firdaus didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Dr. H.R. Thamsir Rachman menyerahkan Ranperda LAMR ke Wagubri H.R. Mambang Mit usai disahkan menjadi Perda, Kamis, 22 Desember 2011.



- Berfoto bersama usai pengesahan Ranperda tentang Lembaga Adat Melayu Riau menjadi Perda, Kamis, 22 Desember 2011.

Dokumentasi Wawancara

1. Diambil dari Penyebaran Islam
2. Diambil dari Undang-Undang
3. Diambil dari Undang-Undang
4. Diambil dari Undang-Undang
5. Diambil dari Undang-Undang
6. Diambil dari Undang-Undang
7. Diambil dari Undang-Undang
8. Diambil dari Undang-Undang
9. Diambil dari Undang-Undang
10. Diambil dari Undang-Undang
11. Diambil dari Undang-Undang
12. Diambil dari Undang-Undang
13. Diambil dari Undang-Undang
14. Diambil dari Undang-Undang
15. Diambil dari Undang-Undang
16. Diambil dari Undang-Undang
17. Diambil dari Undang-Undang
18. Diambil dari Undang-Undang
19. Diambil dari Undang-Undang
20. Diambil dari Undang-Undang
21. Diambil dari Undang-Undang
22. Diambil dari Undang-Undang
23. Diambil dari Undang-Undang
24. Diambil dari Undang-Undang
25. Diambil dari Undang-Undang
26. Diambil dari Undang-Undang
27. Diambil dari Undang-Undang
28. Diambil dari Undang-Undang
29. Diambil dari Undang-Undang
30. Diambil dari Undang-Undang
31. Diambil dari Undang-Undang
32. Diambil dari Undang-Undang
33. Diambil dari Undang-Undang
34. Diambil dari Undang-Undang
35. Diambil dari Undang-Undang
36. Diambil dari Undang-Undang
37. Diambil dari Undang-Undang
38. Diambil dari Undang-Undang
39. Diambil dari Undang-Undang
40. Diambil dari Undang-Undang
41. Diambil dari Undang-Undang
42. Diambil dari Undang-Undang
43. Diambil dari Undang-Undang
44. Diambil dari Undang-Undang
45. Diambil dari Undang-Undang
46. Diambil dari Undang-Undang
47. Diambil dari Undang-Undang
48. Diambil dari Undang-Undang
49. Diambil dari Undang-Undang
50. Diambil dari Undang-Undang
51. Diambil dari Undang-Undang
52. Diambil dari Undang-Undang
53. Diambil dari Undang-Undang
54. Diambil dari Undang-Undang
55. Diambil dari Undang-Undang
56. Diambil dari Undang-Undang
57. Diambil dari Undang-Undang
58. Diambil dari Undang-Undang
59. Diambil dari Undang-Undang
60. Diambil dari Undang-Undang
61. Diambil dari Undang-Undang
62. Diambil dari Undang-Undang
63. Diambil dari Undang-Undang
64. Diambil dari Undang-Undang
65. Diambil dari Undang-Undang
66. Diambil dari Undang-Undang
67. Diambil dari Undang-Undang
68. Diambil dari Undang-Undang
69. Diambil dari Undang-Undang
70. Diambil dari Undang-Undang
71. Diambil dari Undang-Undang
72. Diambil dari Undang-Undang
73. Diambil dari Undang-Undang
74. Diambil dari Undang-Undang
75. Diambil dari Undang-Undang
76. Diambil dari Undang-Undang
77. Diambil dari Undang-Undang
78. Diambil dari Undang-Undang
79. Diambil dari Undang-Undang
80. Diambil dari Undang-Undang
81. Diambil dari Undang-Undang
82. Diambil dari Undang-Undang
83. Diambil dari Undang-Undang
84. Diambil dari Undang-Undang
85. Diambil dari Undang-Undang
86. Diambil dari Undang-Undang
87. Diambil dari Undang-Undang
88. Diambil dari Undang-Undang
89. Diambil dari Undang-Undang
90. Diambil dari Undang-Undang
91. Diambil dari Undang-Undang
92. Diambil dari Undang-Undang
93. Diambil dari Undang-Undang
94. Diambil dari Undang-Undang
95. Diambil dari Undang-Undang
96. Diambil dari Undang-Undang
97. Diambil dari Undang-Undang
98. Diambil dari Undang-Undang
99. Diambil dari Undang-Undang
100. Diambil dari Undang-Undang



Narasumber Datuk Al-Azhar Ketua Majelis Kerapatan Adat LAM Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Narasumber Datuk Syahril Abubakar Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM
Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber Datuk Tarlaili Sekretaris Majelis Kerapatan Adat LAM Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber Datuk Zulkarnain Noerdin Ketua Timbal Dewan Pimpinan Harian LAM Riau



Narasumber Datuk Toni Werdiansyah Penyelaras Bidang Ormas Dan Pengembangan Adat LAM Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR RIAU,

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat Melayu Riau, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Melayu Riau dalam rangka membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu di Provinsi Riau;
- b. bahwa Lembaga Adat Melayu Riau merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi Riau 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang menetapkan Visi dan Misi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Budaya Melayu dalam lingkungan Masyarakat yang Agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nomor Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nomor Tahun 2009 Nomor 10).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945;
2. Kepala Daerah, adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Fasilitas adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan;
4. Lembaga Adat Melayu Riau, selanjutnya disingkat LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Riau;
5. Daerah adalah wilayah Provinsi Riau;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;

9. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung;

10. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari;

11. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka;

12. LAM Riau Kawasan/Rantau adalah meliputi beberapa wilayah kecamatan dan/atau antar kecamatan.

13. LAM Riau Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah desa/kepenghuluan/pebatinan dan/atau antar desa/kepenghuluan/pebatinan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

Pasal 2

(1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat dapat didirikan LAM Riau di daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan atau yang disebut dengan nama lain.

(2) Bagi daerah kabupaten/kota yang belum memiliki LAM Riau dapat membentuk LAM Riau setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Propinsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (3) Badan Perwakilan LAM Riau dapat dibentuk diluar provinsi Riau jika diperlukan, setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Propinsi.
- (4) LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Kabupaten/Kota.
- (5) LAM Riau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang setempat dengan syarat :
 - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
 - c. mempunyai kantor tetap;
 - d. dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LAM Riau terdiri dari :
 - a. LAM Riau Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
 - b. LAM Riau Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
 - c. LAM Riau Kawasan/Rantau berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
 - d. LAM Riau Kenegerian/Kepenghuluan/ Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain berkedudukan di Desa/Kepenghuluan.
- (2) LAM Riau sebagaimana ayat (1) huruf b, c dan d bersifat otonom.
- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.
- (4) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Riau diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 4

LAM Riau berfalsafah Pancasila.



Pasal 5

LAM Riau berasaskan Islam, bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah.

BAB V T U J U A N

Pasal 6

- (1) LAM Riau bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.
- (2) LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.
- (3) LAM Riau bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB VI BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LAM Riau berbentuk konfederasi, yaitu keterpaduan federasi-federasi dari Kabupaten/Kota, Kawasan/Rantau, Kepenghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain di Wilayah Provinsi Riau.
- (2) Bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah tangga LAM Riau.

Pasal 8

LAM Riau berfungsi :

- a. sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;
- b. mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau;
- d. sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; dan
- e. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau.

BAB VII TUGAS POKOK

Pasal 9

- (1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
- (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjiwa ke-Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.
- (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
- (5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

- a. Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu masyarakat dilakukan pemerintah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IX

PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 11

LAM Riau di setiap tingkatan berperan :

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

BAB X

HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) LAM Riau dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat baik Regional, Nasional maupun Internasional.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

BAB XI

SETIA AMANAH ADAT

Pasal 13

- (1) LAM Riau mempunyai payung panji, payung teraju masyarakat Adat Melayu Riau dengan jabatan sebutan Setia Amanah Adat.

- (2) Setia Amanah Adat untuk tingkat Provinsi diberikan kepada Gubernur dan Timbalan Setia Amanah diberikan kepada Wakil Gubernur Riau, untuk Kabupaten/Kota diberikan kepada Bupati/Walikota dan Timbalan Setia Amanah diberikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Gelar lengkap Setia Amanah dan Timbalan Setia Amanah dikukuhkan oleh masing-masing LAM Riau sesuai dengan tingkatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB XII
KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LAM Riau berada sepenuhnya pada Musyawarah Besar untuk tingkat Provinsi dan Musyawarah Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme Musyawarah Besar dan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.
- (3) Kekuasaan tertinggi tingkat Kawasan/Rantau dan Kepenghuluhan/Kepebatinan dan/atau yang disebut nama lain diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing tingkatan.

Pasal 15

Keanggotaan Lembaga Adat Melayu Riau diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber Dana LAM Riau terdiri dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Swadaya Masyarakat;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN
DAN HARI BESAR ADAT

Pasal 17

- (1) Lambang-lambang Adat Melayu Riau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (2) LAM Riau dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian dan sebagiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (3) LAM Riau dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah Riau; dan
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (5) Hari Besar LAM Riau ditetapkan sebagai Hari Besar Adat Melayu Riau setiap tanggal 6 Juni. Hari-hari Besar lainnya akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 18

LAM Riau hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam Musyawarah Besar LAM Riau yang diadakan khusus untuk itu dan/atau oleh Pemerintah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

LAM Riau yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal :

GUBERNUR RIAU

dto

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

dto

H. WANSYAMSIR YUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR: 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG : LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

I. UMUM :

Adat Istiadat Melayu Riau adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung/desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat kampung/desa yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah.

Adat Istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu kampung/desa yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Provinsi Riau. Bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya di daerah merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, maka organisasi lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya. Sebagai tindak lanjut Pasal 22 huruf j dan huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 2007 No. 188.32/1497.DV kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan

pengembangan dikaitkan dengan pelestarian adat dan budaya daerah secara sinergis, terencana dan berkesinambungan. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Lembaga Adat Melayu Riau sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat Melayu Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Perwakilan LAM Riau adalah: yang didirikan oleh LAM Riau Propinsi yang berkedudukan diluar Propinsi Riau, dan saat ini telah terbentuk Badan Perwakilan di Jawa Tengah, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk konfederasi yang dimaksud harus memperhatikan adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan kearifan masing-masing tingkatan

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Hubungan kerjasama dimaksud pasal ini di antaranya meliputi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada 16 April 2006 M/17 Rabiul Awal 1427H dilakukan Musyawarah Lembaga Adat/Majelis Adat Se-Sumatera dan berhasil membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Lembaga Adat Rumpun Melayu Se-Sumatera untuk pertama kalinya Sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Provinsi Riau/Lembaga Adat Melayu Riau ditetapkan dalam Keputusan Nomor: 04-A/Komisi-AZMUSLARM/SUMATRA/2006/1427 tanggal 15 April 2006M/16 Rabiul Awal 1427H.

Pasal 13
Ayat (1)
Payung panji atau payung teraju adalah: tempat berteduh dan berlindung.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Huruf a
Yang dimaksud dengan ketentuan khusus yakni sesuai dengan kearifan masing-masing tingkatan

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
LAM Riau yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 1970 bersamaan tanggal 1 Rabiul Akhir 1390 H. adalah LAM Riau tingkat Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4111/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 02 Desember 2020 M
16 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada
Yth. Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekanbaru
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Fadilah
NIM. : 11775201387
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Organisasi Publik Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



1. Ditujukan kepada pihak yang berkepentingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Himpunan Ulama UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekoncos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/114/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada
Yth. Pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Fadilah
NIM. : 11775201387
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Organisasi Publik Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau (studi Kasus LAM Riau)".
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/590/2020 Pekanbaru, 10 Desember 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
Yth. Fitria Ramadhani Agusti Nasution, S.IP, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurul Fadilah
NIM : 11775201387
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"Analisis Organisasi Publik dalam Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi kasus FPI kota pekanbaru)".

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



1. UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/169/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 14 Januari 2021 M
30 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada
Yth. **Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurul Fadilah
N I M : 11775201387
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Organisasi Publik Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Studi Kasus LAM Riau)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, C
NIP. 19751112 199903 2 001



- Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

لَمْبَاغَا آدَات مَلَايُو رِيَاو

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

Sekretariat: Balai Adat Melayu Riau
 Website: <http://www.lamriau.id> E-mail: lamriauprov@gmail.com
 Telp: (+62761) 8408250. WhatsApp: +6282382440977.
 Jl. Diponegoro No. 39 Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-159/LAMR/III/2021

Lembaga Adat Melayu Riau dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURUL FADILAH
 NIM : 11775201387
 Jurusan : Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Semester : VII

Telah melakukan kegiatan Riset di Lembaga Adat Melayu Riau dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Analisis Organisasi Publik dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (studi kasus LAM Riau)"***.

Pengumpulan data Riset tersebut dilaksanakan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2021 s/d Bulan Februari Tahun 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Rajab 1442 H
 1 Maret 2021 M

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
 DEWAN PIMPINAN HARIAN

KETUA UMUM,

SEKRETARIS UMUM,

DATUK SERI SYAHRIL ABUBAKAR

DATUK H. YUSMAN HAKIM





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurul Fadilah, Lahir di Duri, pada tanggal 01 Desember 1998, Agama Islam. Penulis merupakan anak ke Dua dari Enam Bersaudara, dari pasangan Bapak Antoni dan Ibu Jumiati. Penulis juga mempunyai Satu Kakak Perempuan yang bernama Ani Sri Juita, Dua Adik Perempuan yang bernama Dea Maharani dan Divi Hanifah, serta Dua Adik Laki-Laki yang bernama Haikal Putra dan Adnan Dirga. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 058 Balai Makam di mulai tahun 2005-2011, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 09 Mandau Kecamatan Bathin Solapan dimulai tahun 2011-2014 dan meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 03 Mandau Kecamatan Bathin Solapan dimulai tahun 2014-2017. Setelah itu pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur SBMPTN dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan PKL di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis selama 47 hari, dan penulis juga melaksanakan KKN di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis selama 56 hari.

Email Penulis : nurul01121998@gmail.com